

PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP AUDIT FEE PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA SEKTOR FINANCIAL PERIODE 2019 – 2022

Emmanita Giana Br Ginting

Accounting Department, School of Accounting, Master of Accounting, Bina Nusantara University, Jakarta, Indonesia 11480

Email Coressponding:

emmanita.ginting@binus.ac.id

Abstract.

The company's obligation to publish audited financial statements to the public provides a large enough role for public accountants in providing audit services. In this case, the role of the Public Accountant is to examine and disclose irregularities in the financial statements, especially public companies.. The higher the audit risk assessed by the auditor, the higher the audit effort required to produce an appropriate audit opinion. Therefore, audit risk will determine how much audit fees must be paid by the compan. Researchers are interested in conducting research on the influence of corporate governance on audit fees for companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2019 – 2022. The method in this research is a quantitative research. This research is causal in nature which intends to determine the effect of independent variables in this Corporate Governance (X) on Audit Fee (Y). This analysis is used to provide a description of the research variables good corporate governance, and audit fees. The results of this study indicate that good corporate governance will expand the audit scope and if the audit scope is wide it will result in high audit fees.

Keywords: Good Corporate Governance, Audit Fee, Political Connection, Company Size

PENDAHULUAN

Laporan keuangan menjadi aspek terpenting didalam sebuah perusahaan. Laporan keuangan dapat menggambarkan bagaimana keadaan perusahaan secara keseluruhan, terutama pada bagian posisi keuangannya. Bagian posisi keuangan merupakan aspek yang sangat penting dan sangat disoroti oleh pihak-pihak eksternal perusahaan, seperti pihak manajemen, investor, kreditor, masyarakat, dan pemerintah. Karena laporan keuangan juga dipergunakan bagi pihak eksternal perusahaan, tentunya laporan keuangan harus disajikan dengan andal, akurat dan dapat dipercaya. Di Indonesia, kesadaran akan pentingnya audit laporan keuangan telah meningkat. Perusahaan dan entitas lainnya semakin menyadari manfaat audit dalam memberikan kepercayaan kepada pemangku kepentingan dan memastikan keandalan informasi keuangan. Fenomena ini menjadikan upaya untuk meningkatkan praktik audit laporan keuangan di Indonesia, peran pemerintah, otoritas terkait, profesi akuntansi, dan entitas yang diaudit sangat penting. Kolaborasi antara semua pihak ini diperlukan untuk memastikan kualitas audit yang tinggi, keandalan informasi keuangan, dan kepercayaan yang lebih besar dalam laporan keuangan perusahaan di Indonesia. Sesuai dengan Dasar Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) dari IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) tahun 2019 bahwa pelaporan keuangan menyediakan informasi keuangan tentang entitas pelapor yang berguna untuk investor saat ini dan investor potensial, pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya. Hal ini menjadikan audit laporan keuangan menjadi proses independen dan objektif untuk memeriksa, mengevaluasi, dan memberikan pendapat mengenai keandalan laporan keuangan suatu entitas. Audit laporan keuangan memiliki banyak kepentingan dan manfaat yang penting, baik bagi entitas yang

diaudit maupun pemangku kepentingan lainnya. Kegunaan informasi keuangan juga dapat ditingkatkan jika informasi tersebut terverifikasi (*verifiable*), terbanding (*comparable*), terpaham (*understandable*), dan tepat waktu (*timely*) (Ikatan Akuntan Indonesia, 2019). Kegunaan informasi keuangan juga dapat ditingkatkan jika informasi tersebut terverifikasi (*verifiable*), terbanding (*comparable*), terpaham (*understandable*), dan tepat waktu (*timely*) (Ikatan Akuntan Indonesia, 2019).

Kewajiban perusahaan untuk mempublikasikan laporan keuangan yang telah di audit ke publik, memberikan peran yang cukup besar bagi akuntan publik dalam memberikan jasa auditnya. Dalam hal ini Akuntan Publik berperan untuk memeriksa dan mengungkapkan ketidakwajaran dalam laporan keuangan, terutama bagi perusahaan yang telah menyandang kategori *go public*. Perusahaan *go public* wajib melakukan audit atas laporan keuangannya agar informasi yang tersaji dalam laporan keuangan perusahaan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan bisnis yang tepat dan andal bagi para pemangku kepentingan. Dengan dilakukannya audit akan memberikan informasi laporan keuangan yang lebih relevan dan reliable bagi manajer, pemegang modal, kreditor, pemangku kepentingan dan stakeholder lain (Putri & Rasmini, 2016).

Terkait dengan prosedur audit, sebelum melakukan prosedur audit, auditor akan menilai risiko perusahaan (Ghosh & Tang, 2015). Semakin tinggi risiko audit dinilai oleh auditor, semakin tinggi upaya audit yang diperlukan untuk menghasilkan opini audit yang tepat. Oleh karena itu, risiko audit akan menentukan berapa biaya audit yang harus dibayarkan oleh perusahaan diukur dengan seberapa besar usaha yang diperlukan oleh auditor untuk melakukan audit prosedur. Salah satu bentuk risiko audit yang dinilai oleh auditor adalah risiko inheren yang melekat pada perusahaan. Pengertian risiko inheren sendiri adalah risiko yang dinilai oleh auditor dalam perusahaan sebelum mempertimbangkan efektivitas pengendalian internal perusahaan (Tuanakotta, 2013).

Pertanggungjawaban seorang akuntan publik/ auditor tidak hanya terhadap perusahaan klien-nya, namun juga terhadap masyarakat luas. Oleh karena hal itu, seorang akuntan publik/ auditor dituntut untuk harus memprioritaskan sikap yang objektif dan profesional dalam memberikan jasanya. Salah satu bentuk profesionalisme dari seorang auditor adalah bersikap lugas dan jujur serta menghindari perilaku apapun yang mengurangi kepercayaan atas kinerja dan profesinya.

Kegiatan pemeriksaan atas laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor akan menghasilkan laporan audit dan opini audit yang akan menjadi bahan pertimbangan yang digunakan manajemen perusahaan (manajer) dalam mengambil keputusan. Hubungan kelembagaan antara perusahaan dengan auditor didasari oleh kontrak yang harus dipatuhi kedua belah pihak. Di dalam kontrak tersebut juga disepakati harga atau biaya audit (*fee audit*). *Fee audit* merupakan upah atau imbalan untuk auditor setelah memberikan jasa pemeriksaan atas laporan keuangan kepada klien. Atas jasa audit yang sudah dilakukan tersebut, auditor berhak memperoleh imbal jasa atau fee audit dari entitas perusahaan yang diauditnya (Cristansy & Ardiati, 2018).

Fenomena yang terjadi adalah besarnya biaya audit pada perusahaan masih mengalami naik turun atau tidak stabil. Berikut data biaya audit beberapa perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Tabel 1 *Fee Audit* beberapa perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

No	Perusahaan	2019	2020	2021
1	ARNA	3.926.378.750	2.788.839.000	1.953.136.803
2	BTON	722.013.833	627.969.042	530.268.667
3	DPNS	36.900.000	5.000.000	5.500.000
4	GDST	657.069.174	428.500.000	460.891.000
5	INAF	4.633.918.591	3.538.209.146	4.399.489.419

Sumber: www.idx.co.id

Dilihat dari data diatas, menunjukkan bahwa besarnya biaya audit pada perusahaan masih mengalami fluktuasi atau naik turun dan tidak stabil, oleh karena itu pemberian fee audit tidak ada ketetapan sehingga terjadinya perbedaan atau perubahan yang hanya berdasarkan antara Auditor dengan Perusahaan. Dalam hal ini Akuntan Publik berperan untuk memeriksa dan mengungkapkan ketidakwajaran dalam laporan keuangan, terutama bagi perusahaan yang telah menyandang kategori *go public*. Perusahaan *go public* wajib melakukan audit atas laporan keuangannya agar informasi yang tersaji dalam laporan keuangan perusahaan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan bisnis yang tepat dan andal bagi para pemangku kepentingan. Dengan dilakukannya audit akan memberikan informasi laporan keuangan yang lebih relevan dan reliable bagi manajer, pemegang modal, kreditor, pemangku kepentingan dan stakeholder lain (Ciptana Putri & Rasmini, 2016).

Kegiatan pemeriksaan atas laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor akan menghasilkan laporan audit dan opini audit yang akan menjadi bahan pertimbangan yang digunakan manajemen perusahaan (manajer) dalam mengambil keputusan. Hubungan kelembagaan antara perusahaan dengan auditor didasari oleh kontrak yang harus dipatuhi kedua belah pihak. Di dalam kontrak tersebut juga disepakati harga atau biaya audit (*fee audit*). *Fee audit* merupakan upah atau imbalan untuk auditor setelah memberikan jasa pemeriksaan atas laporan keuangan kepada klien. Atas jasa audit yang sudah dilakukan tersebut, auditor berhak memperoleh imbal jasa atau fee audit dari entitas perusahaan yang diauditnya (Cristansy, J., dan Ardiati, A., 2016).

Good corporate governance menurut FCGI (Forum Corporate Governance in Indonesia) merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang mencakup peraturan serta hak dan kewajiban antara pemegang saham, pengelola perusahaan, karyawan, kreditor, pemerintah, dan pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya (Sarafina & Saifi, 2017). Dengan penerapan *good corporate governance* akan menambah keyakinan principal terhadap hasil pengelolaan perusahaan oleh agent. Oleh karena itu, dengan penerapan *good corporate governance* akan memperluas ruang lingkup audit dan jika ruang lingkup audit luas akan mengakibatkan audit fee yang tinggi karena auditor tidak memerlukan usaha yang lebih dalam mengaudit. Penelitian serupa yaitu penelitian (Xue & O'Sullivan, 2022), (Shan et al., 2019) dan (Wahab et al., 2011) juga menyebutkan bahwa adanya hubungan positif signifikan antara *corporate governance* terhadap *audit fee*. Dengan demikian, *corporate governance* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap audit fees atau biaya audit yang dibebankan oleh perusahaan.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti menemukan bahwa belum ada penelitian sebelumnya yang menggunakan variabel tersebut terhadap *fee audit* dalam satu penelitian. Kontribusi penulis dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengumpulan data terkait *corporate governance* dan *audit fee* dari berbagai sumber, seperti laporan keuangan, laporan tahunan perusahaan, dan penelitian sebelumnya. Adapun penulis juga dapat melakukan analisis deskriptif untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel *corporate governance* dan *audit fee*. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Audit Fee* pada Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019 – 2022”

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan

Teori agensi menjelaskan tentang pemisahan antara pihak pemilik (*principal*) dengan manajer (*agent*) di suatu perusahaan (Pearce & Robinson, 2014). Pihak *agent* diberikan wewenang oleh pihak *principal* untuk melakukan suatu tindakan yang membuat kepentingan dari pihak *principal* dapat tercapai. Secara umum, relasi dalam keagenan menjelaskan hubungan antara yaitu pemegang saham dengan manajer dimana para pemegang saham ingin memaksimalkan nilai saham maka manajer akan memilih strategi untuk mewujudkan hal tersebut. Akan tetapi dalam praktiknya manajer lebih menguntungkan diri sendiri dan mengabaikan keinginan dari pemegang saham.

Hubungan antara manajer dan pemilik dapat menimbulkan permasalahan yang

disebabkan karena adanya *asymmetric information* (Candra, 2016). Asimetri informasi bisa terjadi karena ada pihak yang memiliki informasi lebih banyak daripada pihak lainnya. Pemegang saham hanya mempunyai akses terbatas dalam perusahaan, berbeda dengan manajer yang berperan aktif dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan kinerja perusahaan. Pemegang saham juga tidak dapat mengawasi seluruh keputusan yang telah dibuat oleh manajer dan hanya memiliki sedikit informasi seperti laporan keuangan sedangkan manajer mengetahui informasi yang lebih besar banyak dan mendalam. Hal ini menyebabkan manajer memiliki celah dalam mengejar kepentingannya sendiri. Manajer dapat memberikan informasi fiktif yang menggambarkan kinerjanya baik dengan memanipulasi laporan keuangan sehingga manajer mendapatkan kompensasi berupa bonus.

Terdapat dua permasalahan dasar yang terjadi ketika kepentingan pemegang saham di satu pihak tidak berkesesuaian dengan kepentingan manajer (Sahara & Maharani, 2022). Masalah pertama terjadi secara *ex ante* yaitu sebelum pelayanan (*service*) yang bisa disebut dengan seleksi yang salah (*adverse selection*). *Adverse selection* mengarah kepada keterbatasan dari kemampuan pemegang saham untuk menentukan secara tepat kompetensi dari manajer ketika direkrut. Hal ini terjadi karena pemegang saham tidak memverifikasi secara dini kelayakan dari manajer. Selain itu, hal tersebut berpotensi menimbulkan masalah dalam perbedaan prioritas yang tidak diantisipasi sebelumnya oleh para pemegang saham dan manajer.

Permasalahan kedua adalah terjadi secara *ex post* yaitu setelah pelayanan (*service*). Hal ini terjadi karena pemegang saham tidak memiliki sarana untuk memonitor kinerja manajer yang menyebabkan manajer bertindak sesuai keinginannya sendiri yang sering disebut *moral hazard* atau kekacauan moral. *Moral hazard* adalah suatu bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh manajer kepada pemegang saham. Hal tersebut terjadi akibat dari sesuatu yang manajer lakukan tidak diketahui sepenuhnya oleh para pemegang saham, sehingga menyebabkan adanya peluang bagi pihak manajer untuk mengerjakan hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Hal yang dapat mengatasi masalah keagenan adalah adanya kebutuhan seperti pihak yang independen sebagai pihak ketiga untuk menjadi mediator yaitu auditor eksternal yang akan memberi pendapat mengenai kewajaran pada laporan keuangan yang dibuat oleh manajer. Auditor eksternal memiliki kewajiban untuk mengawasi perilaku manajer dan memastikan bahwa manajer sudah bertindak sesuai dengan aturan yang ada. Hal tersebut menimbulkan biaya agensi (*agency cost*). Pada dasarnya biaya agensi dikelompokkan menjadi beberapa yaitu biaya kompetensi intensif, biaya pemantauan dan kerugian residual. *Audit fee* merupakan contoh dari biaya pemantauan yang berguna untuk mengamati, memantau serta mengukur perilaku *agent*.

Audit Fee

Menurut El-Gammal, (2012) *Audit Fee* adalah besaran biaya yang tergantung antara lain pada resiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tinggi keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya. Menurut Xingze (2018) *Audit Fee* adalah honorarium yang dibebankan oleh akuntan publik kepada perusahaan auditee atas jasa audit yang dilakukan akuntan publik terhadap laporan keuangan. Penetapan biaya audit yang dilakukan oleh KAP berdasarkan biaya perhitungan dari biaya pokok pemeriksaan yang terdiri dari biaya langsung dan tidak langsung. Menurut Primasari & Sudarno (2013), *Fee Audit* adalah imbalan yang diterima auditor atas jasa audit yang diberikan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *Fee audit* adalah besaran biaya atau imbalan atas jasa yang dibebankan oleh akuntan publik kepada perusahaan atas jasa audit yang dilakukan akuntan publik terhadap laporan keuangan.

Penetapan biaya audit adalah proses menentukan jumlah yang akan dibayarkan oleh perusahaan kepada firma akuntan publik (auditor) untuk melaksanakan audit laporan keuangan. Proses ini melibatkan berbagai faktor yang dipertimbangkan oleh perusahaan dan auditor. Penetapan biaya audit yang dilakukan oleh KAP berdasarkan biaya perhitungan dari biaya

pokok pemeriksaan yang terdiri dari biaya langsung dan tidak langsung, resiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tinggi keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan professional lainnya (Salvador, et. al., 2018). Dengan demikian, Perusahaan yang lebih besar dan kompleks dengan berbagai unit bisnis, cabang, atau entitas anak mungkin memerlukan lebih banyak waktu dan upaya dari auditor untuk melaksanakan audit. Semakin besar dan kompleks perusahaan, semakin tinggi kemungkinan biaya audit yang diperlukan.

Good Corporate Governance

Good Corporate Governance adalah sistem tata kelola perusahaan yang diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia dan *International Monetary Fund* (IMF). Konsep ini diharapkan dapat melindungi pemegang saham (*stockholder*) dan kreditor untuk memulihkan investasinya. Sejak penandatanganan *Letter of Intent* (LOI) dan IMF, Indonesia mulai menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang salah satunya adalah menyusun jadwal perbaikan manajemen perusahaan Indonesia. Karakteristik *good corporate governance* merujuk pada struktur, kebijakan, dan praktik yang digunakan oleh sebuah perusahaan untuk mengelola dan mengawasi aktivitas perusahaan, serta mengatur hubungan antara berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) (FCGI, 2001). *Good corporate governance* memerlukan adanya kebijakan perusahaan yang jelas dan transparan. Kebijakan tersebut mencakup prinsip-prinsip etika, integritas, dan perilaku bisnis yang berkelanjutan. Kebijakan dan etika perusahaan harus diikuti oleh seluruh karyawan dan pemangku kepentingan dalam perusahaan.

Menurut Effendi (2016), Tata kelola perusahaan yang baik dapat didefinisikan sebagai sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi setiap *stakeholders*. Ada dua hal yang ditekankan dalam mekanisme ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham atau investor untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya, dan kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara akurat, tepat waktu dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholders*.

Menurut Rustam (2017), *Good Corporate Governance* adalah serangkaian keterkaitan antara dewan komisaris, direksi, pihak-pihak yang berkepentingan, serta pemegang saham perusahaan. GCG menciptakan sebuah struktur yang membantu perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha, memerhatikan kebutuhan stakeholder dan memastikan perusahaan beroperasi secara sehat, aman dan mematuhi perlindungan hukum.

Menurut Alfinur (2016) definisi *Good Corporate Governance* adalah *Good Corporate Governance* merupakan salah satu upaya untuk membangun perusahaan yang kokoh dan berkelanjutan. Penerapan *Good Corporate Governance* diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan perusahaan yang lebih transparan kepada pemangku kepentingan. Penerapan *Good Corporate Governance* membutuhkan komitmen dari seluruh insan organisasi sebagai dasar kebijakan ketertiban yang harus ditaati dan diterapkan oleh manajemen puncak sebagai kode etik yang harus ditaati oleh semua pihak di dalam perusahaan.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* adalah suatu sistem yang mengatur atau mengendalikan serta mengawasi perusahaan agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Perusahaan yang menerapkan *good corporate governance* diharapkan memiliki kinerja yang baik dan transparan sehingga meminimalisir terjadinya kecurangan atau konflik perbedaan kepentingan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor dan meningkatnya nilai perusahaan.

Penelitian Xue & O'Sullivan (2022) dan Shan et al. (2019) juga menyebutkan bahwa adanya hubungan positif signifikan antara *corporate governance* terhadap *audit fee*. Berdasarkan argumen di atas tersebut, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

H1 : *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap *audit fee*

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian ini bersifat kausal yang bermaksud untuk mengetahui pengaruh variabel independen dalam hal ini *Corporate Governance* (X) terhadap *Audit Fee* (Y). Operasionalisasi variable *audit fees* diproksikan oleh akun *professional fee* yang terdapat dalam laporan keuangan pada perusahaan yang terdaftar di BEI. Pengungkapan data tentang *fee* audit masih bersifat *voluntary disclosure* sehingga belum banyak perusahaan mencantumkan data *professional fee* di dalam annual reportnya.

Fee audit diukur menggunakan logaritma natural dari data atas akun *professional fee* karena pengungkapan data tentang *fee* audit masih bersifat *voluntary disclosure* sehingga belum banyak perusahaan mencantumkan data *professional fee* di dalam annual reportnya. pada bagian tata kelola perusahaan. *Fee* audit kemudian di ukur menggunakan logaritma natural dari total *fee* audit.

$$\text{Fee audit} = \text{logaritma natural professional fee.}$$

Operasionalisasi variable *Good Corporate Governance* (GCG) diukur dengan menggunakan skor GCG melalui tahapan dan penilaian bobot CGPI (*Corporate Governance Perception Index*) yang dipublikasikan FCGI (*Forum For Corporate Governance in Indonesia*). Variabel ini menggunakan skala rating yaitu memberikan skor berupa angka mulai 0-100. Peringkat sudah diberikan oleh The Indonesian Institute for Corporate governance (IICG) berupa peringkat perusahaan sangat terpercaya, terpercaya, dan cukup terpercaya.

Penelitian ini menggunakan variabel yaitu *audit fee* sebagai variabel dependen, penerapan *good corporate governance* sebagai variabel independen. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder ini diambil dari laporan tahunan yang diambil dari database Bloomberg, SWA sebagai media publikasi dari IICG, *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD) dari *website idx.co.id* dan situs web masing-masing perusahaan. Analisis deskriptif didasarkan pada data yang telah dikumpulkan lalu dianalisis. Analisis ini digunakan untuk memberikan deskripsi mengenai variabel-variabel penelitian *Good Corporate Governance* dan *audit fee* yang dapat dilihat dari jumlah data, angka rata-rata, kisaran, dan standar deviasi. Langkah dalam pengolahan data dan analisis deskriptif dengan mencari data yang relevan dan menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Audit Fee*

Teori agensi menjelaskan bahwa terdapat hubungan pendelegasian wewenang dari principal (investor) kepada agent (manajer) untuk melakukan pengelolaan atas nama principal. Pengelolaan perusahaan yang terpisah ini akan mengakibatkan hubungan principal dengan agent ini dapat terjadi perbedaan kepentingan dikarenakan agent akan mementingkan kepentingannya sendiri dan mengabaikan kepentingan principal atau karena adanya *asymmetric information*. Akibat adanya perbedaan kepentingan ini maka akan menimbulkan masalah keagenan atau *agency problem*. Masalah keagenan dapat diatasi dengan menerapkan pengendalian *good corporate governance*.

Good corporate governance menurut FCGI (*Forum Corporate Governance in Indonesia*) merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang mencakup peraturan serta hak dan kewajiban antara pemegang saham, pengelola perusahaan, karyawan, kreditur, pemerintah, dan pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya (Sarafina & Saifi, 2017). *Good corporate governance* merupakan bentuk pengendalian dari *agency problem*, karena dalam *good corporate governance* terdapat lima prinsip yaitu

transparency, accountability, responsibility, fairness, dan independency. Sehingga dengan penerapan *good corporate governance* akan menambah keyakinan principal terhadap hasil pengelolaan perusahaan oleh agent. Oleh karena itu, dengan penerapan *good corporate governance* akan memperluas ruang lingkup audit dan jika ruang lingkup audit luas akan mengakibatkan audit fee yang tinggi karena auditor tidak memerlukan usaha yang lebih dalam mengaudit. Penelitian Xue & O'Sullivan (2022) dan Shan et al. (2019) juga menyebutkan bahwa adanya hubungan positif signifikan antara *corporate governance* terhadap *audit fee*.

Terdapat beberapa studi yang telah dilakukan untuk memahami hubungan antara GCG dan Audit Fee di berbagai pasar keuangan. Beberapa penelitian menunjukkan adanya hubungan positif antara praktik GCG yang baik dan audit fee yang lebih tinggi, sedangkan penelitian lain menunjukkan hubungan yang tidak signifikan atau bahkan negatif. Fenomena yang terjadi saat ini adalah besarnya biaya audit pada perusahaan masih mengalami naik turun atau tidak stabil. Berikut data biaya audit beberapa perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Tabel 2 Fee Audit Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021

No	Perusahaan	2019	2020	2021
1	ARNA	3.926.378.750	2.788.839.000	1.953.136.803
2	BTON	722.013.833	627.969.042	530.268.667
3	DPNS	36.900.000	5.000.000	5.500.000
4	GDST	657.069.174	428.500.000	460.891.000
5	INAF	4.633.918.591	3.538.209.146	4.399.489.419

Sumber: www.idx.co.id

Dilihat dari data diatas, menunjukkan bahwa besarnya biaya audit pada perusahaan masih mengalami fluktuasi atau naik turun dan tidak stabil, oleh karena itu pemberian fee audit tidak ada ketetapan sehingga terjadinya perbedaan atau perubahan yang hanya berdasarkan antara Auditor dengan Perusahaan. Dalam konteks Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Good Corporate Governance bagi Perusahaan Terbuka. Peraturan tersebut memuat pedoman GCG yang mengharuskan perusahaan yang terdaftar di BEI untuk menerapkan praktik GCG yang baik. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hubungan antara GCG dan Audit Fee di pasar modal Indonesia meliputi:

1. Kualitas Pelaporan Keuangan: Implementasi praktik GCG yang baik dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang akurat dan transparan memudahkan auditor dalam melaksanakan tugas mereka. Jika perusahaan memiliki laporan keuangan yang berkualitas tinggi, risiko audit mungkin lebih rendah, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi audit fee.
2. Kepemilikan Saham dan Struktur Perusahaan: Struktur kepemilikan perusahaan, seperti kepemilikan manajerial atau kepemilikan institusional, dapat mempengaruhi audit fee. Perusahaan dengan kepemilikan yang terdiversifikasi dan terkonsentrasi mungkin memiliki tingkat risiko yang berbeda dalam hal GCG, yang dapat berdampak pada audit fee.
3. Ukuran Perusahaan: Ukuran perusahaan dapat mempengaruhi audit fee. Perusahaan yang lebih besar mungkin memiliki operasional yang lebih kompleks dan memerlukan upaya audit yang lebih besar, yang dapat meningkatkan audit fee. Namun, perusahaan dengan praktik GCG yang kuat mungkin dapat meminimalkan risiko dan kompleksitas operasional mereka, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi audit fee secara positif.
4. Kualitas Dewan Komisaris dan Dewan Direksi: Komposisi dan kualitas Dewan Komisaris dan Dewan Direksi perusahaan juga dapat mempengaruhi audit fee. Dewan yang kompeten dan independen dapat meningkatkan efektivitas pengendalian internal perusahaan, yang dapat berdampak pada audit fee.

Dengan demikian, penting untuk dicatat bahwa pengaruh GCG terhadap audit fee dapat

bervariasi antara perusahaan dan waktu.

menginginkan kualitas audit yang lebih tinggi dari auditor. Penerapan *good corporate governance* akan memperluas ruang lingkup audit dan jika ruang lingkup audit luas akan mengakibatkan audit fee yang tinggi karena auditor tidak memerlukan usaha yang lebih dalam mengaudit.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S. (2017). *Auditing : Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik* (Edisi 5).
- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley., M. S. (2015). *Auditing dan jasa assurance Pendekatan Terintegrasi* (Edisi 15). Erlangga.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Ariningrum, I., & Diyanty, V. (2017). The impact of political connections and the effectiveness of board of commissioner and audit committees on audit fees. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 11(4), 53–70. <https://doi.org/10.14453/aabfj.v11i4.5>
- Cameran, M., & Perotti, P. (2014). Audit fees and IAS/IFRS adoption: Evidence from the banking industry. *International Journal of Auditing*, 18(2), 155–169. <https://doi.org/10.1111/ijau.12019>
- Candra, A. (2016). Asimetri Informasi pada Pembiayaan Pemilikan Rumah di Bank Syari'ah Mandiri. *Jurnal Ekonomi Bisnis Islam*, 2(1).
- Chaney, P. K., Faccio, M., Parsley, D., Chaney, P. K., Faccio, M., & Parsley, D. (2011). The quality of accounting information in politically connected firms. *Journal of Accounting and Economics*, 51(1–2), 58–76. <https://econpapers.repec.org/RePEc:eee:jaecon:v:51:y:2011:i:1-2:p:58-76>
- Choi, J., Kim, J., Kim, F., & Zang, Y. (2010). Institutional Knowledge at Singapore Management University Audit Office Size , Audit Quality and Audit Pricing Audit Office Size , Audit Quality and Audit Pricing. In *Auditing: A Journal of Practice & Theory* (Vol. 29, Issue 1).
- Coffie, W., & Bedi, I. (2019). The effects of IFRS adoption and firm size on audit fees in financial institutions in Ghana. *Accounting Research Journal*, 32(3), 436–453. <https://doi.org/10.1108/ARJ-07-2017-0114>
- Cristansy, J., & Ardiati, A. Y. (2018). Pengaruh Kompleksitas Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Dan Ukuran Kap Terhadap Fee Audit Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2016. *Modus*, 30(2), 198–211.
- Doogar, R., Sivadasan, P., & Solomon, I. (2015). Audit fee residuals: Costs or rents? *Review of Accounting Studies*, 20(4), 1247–1286. <https://doi.org/10.1007/s11142-015-9322-2>
- Effendi, A. (2016). *The Power Of Corporate Governance: Teori dan Implementasi*. Salemba Empat.
- Fung, N. S., Ahmad, A., & Omar, Z. (2015). Work-Family enrichment: Its mediating role in the relationships between workplace support factors and teachers' job satisfaction. *American Journal of Applied Sciences*, 12(4), 242–253. <https://doi.org/10.3844/ajassp.2015.242.253>
- Ghosh, A. Al, & Tang, C. Y. (2015). Assessing financial reporting quality of family firms: The auditors' perspective. *Journal of Accounting and Economics*, 60(1), 95–116. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2015.03.002>
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26* (Edisi 10). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Gujarati, D., & Dawn, C. P. (2012). *Basic Econometrics*. Mc Graw Hill Inc.
- Halim, A. (2014). *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Haryani, J., & Wiratmaja, I. D. N. (2014). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Komite Audit, Penerapan Dan International Financial Reporting Standards Dan Kepemilikan Publik Pada Audit Delay. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, ISSN: 2302-8556, 6(1), 63–78.
- Harymawan, I., Nasih, M., Madyan, M., & Sucahyati, D. (2019). The role of political connections on family firms' performance: evidence from Indonesia. *International Journal of Financial Studies*, 7(4). <https://doi.org/10.3390/ijfs7040055>
- Hasan, M. A. (2017). Pengaruh Kompleksitas Audit, Profitabilitas Klien, Ukuran Perusahaan dan Ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap Audit Fee. *Pekbis Jurnal*, 9(3), 214–230.
- Hediono, B. P., & Prasetyaningsih, I. (2019). Pengaruh Implementasi Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 14(1), 47. <https://doi.org/10.21460/jrmb.2019.141.315>
- IAPI. (2016). Peraturan Pengurus Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan. In *Jurnal Ekonomi Modernisasi* (Vol. 14, Issue 3, pp. 177–194).
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2019). Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK). *Disak Iai*, 1–78. [http://iaiglobal.or.id/v03/files/file_berita/DE Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan \(KKPK\).pdf](http://iaiglobal.or.id/v03/files/file_berita/DE%20Kerangka%20Konseptual%20Pelaporan%20Keuangan%20(KKPK).pdf)
- Jelita, B., & Cahyaningsih. (2019). Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Koneksi Politik (Studi pada Perusahaan Sektor Industri dan Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2017) Corporate Social Responsibility , Political Connection , And Fiscal Loss Comp. *E-Proceeding of Management*, 6(2), 3618–3624.
- Kim, C., & Zhang, L. (2016). Corporate Political Connections and Tax Aggressiveness. *Contemporary Accounting Research*, 33(1), 78–114. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12150>
- Kristanto, A. (2020). Pengaruh Political Connections Terhadap Kinerja Perusahaan. *Exero: Journal of Research in Business and Economics*, 2(1), 1–21. <https://doi.org/10.24071/exero.v2i1.2049>
- Nazeri, A. N. N., & Nor, S. M. (2022). The 10th Islamic Banking, Accounting And Finance International Conference 2022 (ibaf 2022). *Islamic Banking, Accounting and Finance International Conference*, 2022(2003), 172–180.
- Nurdjanti, F. A., & Pramesti, W. (2018). Pengaruh Firm Size, Subsidiaries, dan Auditor Size terhadap Audit Fee. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 1(1). <https://doi.org/10.22515/jifa.v1i1.1170>
- Pearce, J. A., & Robinson, R. B. J. (2014). *Manajemen strategi*. Salemba Empat.
- Primasari, R., & Sudarno. (2013). Pengaruh Koneksi Politik Dan Corporate Governance Terhadap Audit Fee. *Diponegoro Journal of Accounting*, 0(0), 344–359.
- Puspitowati, N. I., & Mulya, A. A. (2014). SUMMERTIME IN INDONESIA? The Indonesian Jazz All-Stars 1967 tour of Europe. *Perfect Beat*, 8(July), 3–21.
- Putri, K. D. C., & Rasmini, N. K. (2016). Fee Audit Sebagai Pemoderasi Pengaruh Auditor Switching Pada Kualitas Audit. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(3), 2017–2043.
- Rustam, B. R. (2017). *Manajemen Risiko: Prinsip, Penerapan, dan Penelitian*. Salemba Empat.
- Sahara, L. I., & Maharani. (2022). Pengaruh Kinerja Keuangan, Kepemilikan Saham Dan Reputasi Auditor Terhadap Internet Financial Reporting Pada Perusahaan Sektor

Konsumsi Yang Terdaftar Di Bei. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 5(4), 1178–1186.

- Sarafina, S., & Saifi, M. (2017). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan dan Nilai Perusahaan. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 50(3), 108–117. <http://eprints.stiei-kayutangi-bjm.ac.id/1146/>
- Sekaran, U. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian* (Edisi 6). Salemba Empat.
- Shan, Y. G., Troshani, I., & Tarca, A. (2019). Managerial ownership, audit firm size, and audit fees: Australian evidence. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 35, 18–36. <https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2019.05.002>
- Tuanakotta, T. M. (2013). *Audit Berbasis ISA (International Standards On Auditing)*. Salemba Empat.
- Wahab, E. A. A., Zain, M. M., & James, K. (2011). Political connections, corporate governance and audit fees in Malaysia. *Managerial Auditing Journal*, 26(5), 393–418. <https://doi.org/10.1108/02686901111129562>
- Wu, X. (2012). Corporate governance and audit fees: Evidence from companies listed on the Shanghai Stock Exchange. *China Journal of Accounting Research*, 5(4), 321–342. <https://doi.org/10.1016/j.cjar.2012.10.001>
- Xingze Wu, Corporate governance and audit fees: Evidence from companies listed on the Shanghai Stock Exchange, *China Journal of Accounting Research*, Volume 5, Issue 4, 2012, Pages 321-342
- Xue, B., & O’Sullivan, N. (2022). The Determinants of Audit Fees in the Alternative Investment Market (AIM) in the UK: Evidence on the Impact of Risk, Corporate Governance and Auditor Size. *Corporate Governance and Auditor Size ...*, 100523. <https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2023.100523>

